

**KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
SYAWITRI RAUZIAH
NIM. 180802058**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syawitri Rauziah
NIM : 180802058
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Koto, 22 November 1999
Alamat : Kotafajar, Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan


Syawitri Rauziah
NIM. 180802058

**KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program

Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Syawitri Rauziah

180802058

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diminaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

**KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2022

04 Jumadil Awal 1444H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahmuddin, M.Si.


Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 197210201997031002

NIP. 198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,


Eka Januar, M.Soc.Sc.


Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 1984010112015031003

NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia S.Ag.M.Ag

NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Penelitian ini tentang Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan. Latar belakang penelitian ini karena kepercayaan publik merupakan langkah awal dalam suksesnya kebijakan pemerintah. Jika kepercayaan publik tinggi, maka peluang suksesnya kebijakan pemerintah juga tinggi begitu juga sebaliknya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui kebijakan Vaksinasi COVID-19 akan menentukan keberhasilan capaian Vaksin COVID-19. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Selatan melakukan Vaksinasi COVID-19 karena diberlakukannya sanksi administrasi dan ditahannya bantuan sosial sampai masyarakat memiliki bukti bahwa mereka telah divaksin. Sehingga yang mendorong mereka untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 bukan karena kepercayaan terhadap Pemerintah atau Vaksinasi COVID-19 itu sendiri melainkan masyarakat merasa didesak untuk melakukan Vaksinasi COVID-19. Dan upaya-upaya selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seperti: melakukan sosialisasi, memberlakukan sanksi administrasi, memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan memberikan reward kepada masyarakat yang telah divaksin lebih berfokus kepada capaian cakupan target Vaksinasi COVID-19, bukan berfokus kepada meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Vaksinasi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten aceh Selatan merubah fokusnya. Yaitu lebih fokus membangun kepercayaan masyarakat. Karena jika kepercayaan masyarakat tinggi maka kebijakan sekarang maupun yang akan datang yang dibuat oleh pemerintah tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi.

Kata Kunci : *Kepercayaan Publik, Strategi Pemerintah, Vaksinasi COVID-19.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kabupaten Aceh Selatan**”. Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat lulus dari Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar Sarjana, yaitu pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa kepada Almarhum Abah yang senantiasa mendoakan, menasehati, menyemangati, mendidik dan membina penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga Allah merahmati Abah.

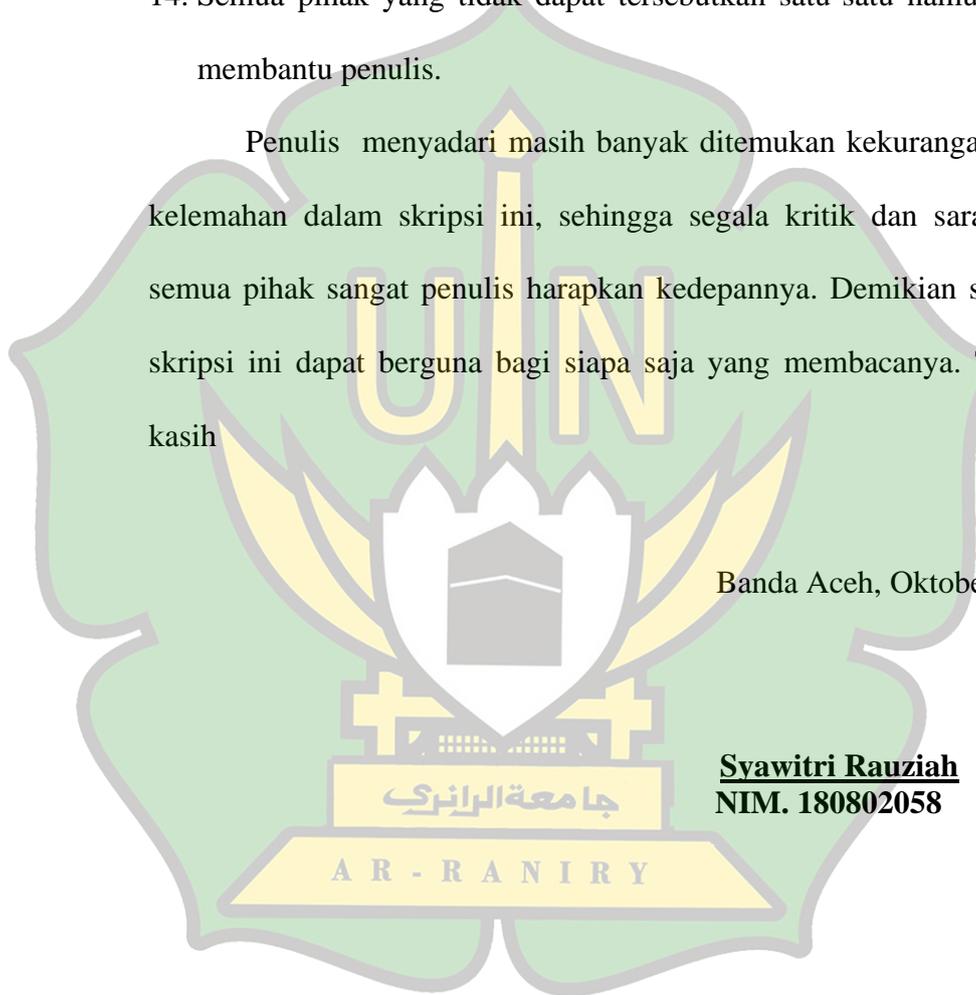
2. Yang tercinta kepada Mak yang telah bekerja keras membesarkan penulis dengan tulus, mendoakan dan menasehati dengan penuh cinta. Semoga Allah senantiasa menyayangi Mak.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
6. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Adik penulis tercinta, Maisuri. Yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis.
10. Yang penulis muliakan Ustadz Taufiqurrahman, B.Sh. yang telah mengajarkan penulis banyak hal.
11. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberi masukan untuk penulis.

12. Rifka Hidayah yang telah bersedia banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh informan Penelitian yang bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti memperoleh informasi dan hasil
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu namun turut membantu penulis.

Penulis menyadari masih banyak ditemukan kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan kedepannya. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Terima kasih

Banda Aceh, Oktober 2022

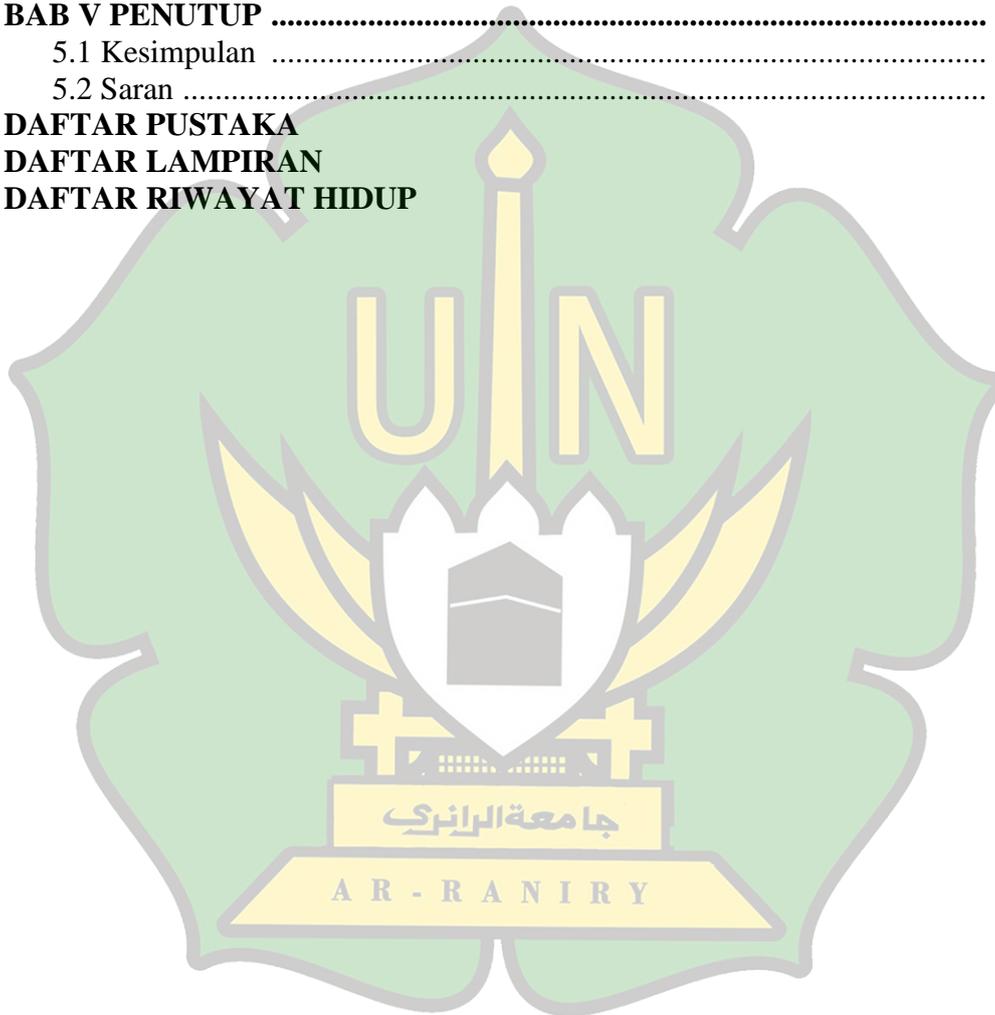
Syawitri Rauziah
NIM. 180802058



DAFTAR ISI

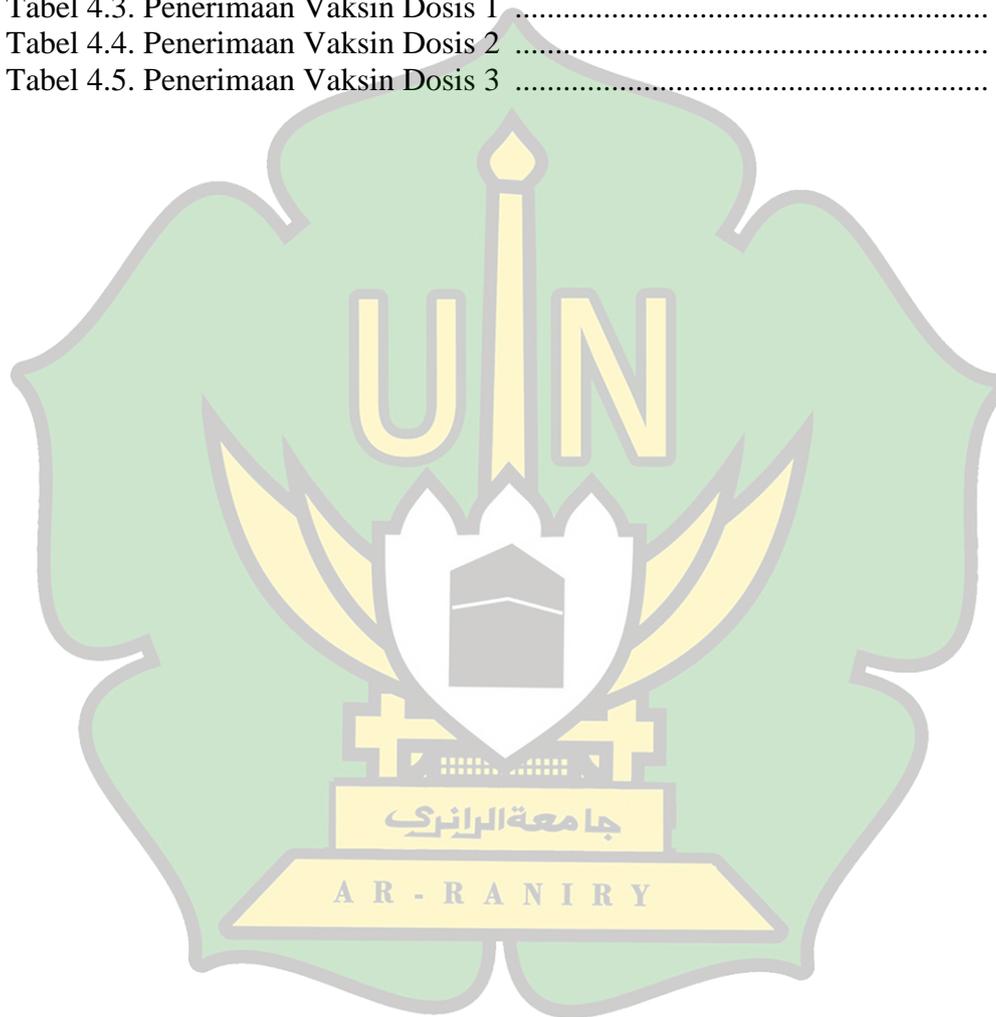
| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.6 Penjelasan Istilah | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Teori Kepercayaan Publik | 16 |
| 2.3 Konsep Vaksinasi | 19 |
| 2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | 21 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran | 24 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 25 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 25 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 27 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 31 |
| 3.5 Informan Penelitian | 33 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 35 |
| 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 35 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 38 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| 4.1.2 Bahasa Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan | 41 |
| 4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan | 43 |
| 4.1.4 Demografi Kabupaten Aceh Selatan | 44 |
| 4.2 Pembahasan | 45 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 4.2.1 | Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan | 45 |
| 4.2.2 | Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan..... | 61 |
| 4.2.3 | Data Rekapitulasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan Per Kecamatan | 66 |
| BAB V PENUTUP | | 73 |
| 5.1 | Kesimpulan | 73 |
| 5.2 | Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1. Pemetaan Vaksinasi Covid-19 Aceh Selatan Tahun 2022 | 2 |
| Tabel 3.1. Kepercayaan publik masyarakat Aceh Selatan | 27 |
| Tabel 3.2. Sosialisasi kepercayaan publik | 28 |
| Tabel 3.3. Informan penelitian | 29 |
| Tabel 3.4. Profil Informan | 33 |
| Tabel 4.3. Penerimaan Vaksin Dosis 1 | 66 |
| Tabel 4.4. Penerimaan Vaksin Dosis 2 | 68 |
| Tabel 4.5. Penerimaan Vaksin Dosis 3 | 70 |



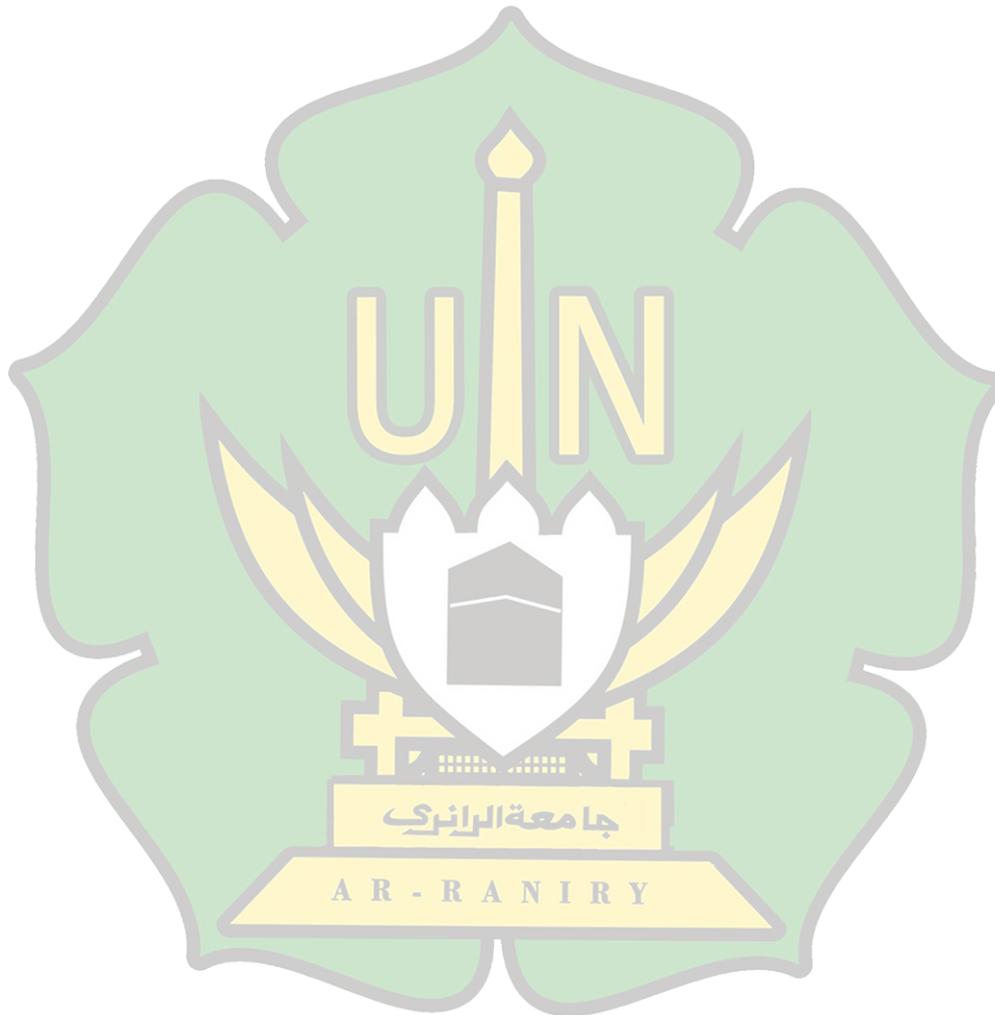
DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran | 24 |
| Gambar 4.1. Letak Geografis | 39 |
| Gambar 4.2. 11 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan | 43 |
| Gambar 4.3. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan di SDN 1 Tapak Tuan | 55 |
| Gambar 4.4. Spanduk Himbauan Vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kluet Selatan | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Instrumen Penelitian | 78 |
| Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian | 79 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian | 81 |
| Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup | 84 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Corona virus Disease 2019 atau COVID-19 sampai saat ini belum bisa benar-benar diatasi, karena penyebaran virus ini sangat cepat. Salah satu upaya pemerintah sebagai ikhtiar untuk membasmi virus ini yaitu dengan melakukan vaksinasi. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan vaksin sebagaimana perintah dari Presiden Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)¹, seluruh daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan vaksinasi.

Sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pasal 13A ayat 2, “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19”². Sama seperti daerah yang lain, Aceh juga mulai melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya sejak 15 januari 2021. Mulai dari tenaga medis, tokoh-tokoh penting dan seluruh masyarakat diharuskan untuk melaksanakan

¹ Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

² Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

vaksinasi sebagai upaya dan usaha untuk memberantas virus yang mematikan ini. Sejak hari pertama digelarnya vaksinasi, pemerintah kota Banda Aceh terus gencar melaksanakan vaksin massal untuk percepatan penanganan pandemi. Dilansir dari antaranews.com, Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh mengatakan, “target masyarakat yang divaksin 700 orang per hari dengan memprioritaskan lansia terlebih dahulu. Pada tahap pertama, sebanyak 2.493 warga telah berhasil divaksinasi”.³

Tabel 1.1.
Pemetaan Vaksinasi Covid-19 Aceh Selatan 08 Februari Tahun 2022

| No | Status Vaksin | Target | Realisasi | Persentase |
|----|---------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Vaksin 1 | 184649 | 140846 | 76,3% |
| 2 | Vaksin 2 | 184649 | 58585 | 31,7% |
| 3 | Vaksin 3 | 184649 | 2461 | 1,3% |

Sumber: Tim Gugus Tugas COVID-19

Pada dasarnya aktivitas penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh sudah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan melihat pemetaan dari gugus tugas COVID secara menyeluruh dan merata dalam kabupaten dan kota dalam provinsi aceh itu sendiri. Salah satunya dapat kita cermati di Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah ujung selatan Provinsi Aceh yang terletak antara 20-40 Lintang Utara (LU) dan 960-900 Bujur Timur (BT)

³ Alfath Asmunda, *Lima Hari 2.493 Warga Banda Aceh Divaksinasi Covid-19*, merdeka.com, 2021. (diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 10:15)

Demikian pula dengan keberadaan Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki 18 kecamatan dan 260 gampong dari total 5.827 gampong di seluruh Aceh. Sehingga status Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami pandemi covid-19 sebagaimana tabel 1.1

Dalam perkembangan pandemi COVID-19 sebagai kepercayaan publik masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan studi implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Gambaran ini menunjukkan bahwa adanya naik turun jumlah masyarakat yang mengikuti vaksinasi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik yang dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman terhadap penanganan kesehatan berkenaan pandemi, lemahnya sosialisasi oleh Pemerintah dan ketakutan masyarakat dengan tindakan vaksinasi yang dilaksanakan.

Ketika awal *issue* vaksin ini hadir, banyak sekali timbul pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang menolak dengan berbagai alasan dan asumsi tentang COVID-19 dan vaksinnya. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang antusias mendukung kebijakan Pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai ikhtiar penanganan pandemi COVID-19. Bahkan ketika vaksinasi telah diselenggarakan pun masih banyak masyarakat yang tetap enggan divaksin disebabkan oleh stigma negatif yang timbul ditengah masyarakat.

Timbulnya pro dan kontra tersebut salah satu pengaruhnya karena kepercayaan publik masyarakat kepada Pemerintahnya. Banyak alasan masyarakat menolak vaksinasi ini dengan berbagai alasan, yaitu dugaan virus ini dirancang secara sengaja dengan motif bisnis, ada juga masyarakat yang meragukan kehalalannya, ada pula masyarakat yang menolak dikarenakan takut vaksin ini menimbulkan efek samping yang parah serta kurangnya kepercayaan masyarakat karena walaupun telah divaksin, namun kasus COVID-19 tetap masih banyak.

Padahal Pemerintah telah membuat sanksi bagi masyarakat yang enggan untuk divaksin. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pasal 13A ayat (4) dan (5),” Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda”, dan “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.⁴

⁴ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Adapun tujuan dilakukan penelitian sesuai dengan permasalahan ini karena ingin mengamati fenomena sosial berkaitan dengan kepercayaan publik Kabupaten Aceh Selatan terhadap vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian sebagaimana tersebut, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Lemahnya kemampuan kepercayaan publik Kabupaten Aceh Selatan sehingga terciptanya apatisme dalam kehidupan individu dan kelompok masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh.
2. Rendahnya kapasitas sosialisasi kepercayaan publik terhadap tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Selatan yang menyebabkan kurang pahami masyarakat untuk dapat mengerti terhadap aktivitas program pemerintah terhadap COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana strategi Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi COVID-19?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepercayaan publik masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi COVID-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

Dalam pemekaran Ilmu Administrasi Negara pada FISIP UIN Ar-Raniry perlu dibangun suatu konstruksi administrasi berkenaan dengan kepercayaan publik masyarakat Kabupaten Aceh Selatan agar supaya masyarakat memahami secara prosedural dalam pemberdayaan kebijakan pemerintah melalui sosialisasi kepercayaan publik terhadap tim gugus tugas Aceh.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

Terciptanya rancang bangun kepercayaan publik masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dengan penerapan Pemerintah melalui sosialisasi kepercayaan publik itu sendiri kepada masyarakat terhadap tim gugus tugas Aceh sehingga dapat menekan penyebaran virus pandemi saat ini.

1.6. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.⁵ Dasgupta (1988) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Pada tingkat individu, anda mempercayai seorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang anda ketahui tentangnya, disposisi, kemampuannya, reputasi dan sebagainya tidak hanya karena sekedar dia mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Pada tingkat kolektif, jika anda tidak percaya suatu badan atau organisasi dengan mana individu berafiliasi, anda tidak akan percaya padanya untuk membuat kesepakatan atau kerja sama.⁶

Menurut Moordiningsih, kepercayaan (*trust*) di Asia Timur, kepercayaan merupakan konsep relasional bukan individual. Ia tidak berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi individu.

⁵ Martin Veno H dan Dr. Hartono Subagio, *Analisis Pengaruh Kepercayaan terhadap tenaga penjual (trust in employee), dan kepercayaan terhadap merek (trust in brand) terhadap niat beli (purchase intention) konsumen pada Berninin furniture di Surabaya dan Semarang*, 2013. Vol. 1, No. 2

⁶ ibid

Kepercayaan adalah konsep yang mengandung harmoni, jaminan, dan kesejahteraan untuk individu dan komunitas. Kepercayaan dikembangkan mulai dari keluarga, dalam kelekatan hubungan orang tua dan anak. Kemudian kepercayaan berkembang dalam lingkungan kerabat dan teman dekat.⁷

Lebih lanjut, Moordiningsih mengatakan bahwa membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayai tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen⁸. Sedangkan menurut KBBI, kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata⁹.

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan seseorang kepada orang lain dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sama halnya dengan keadaan sekarang ini, mengenai kepatuhan masyarakat

⁷ Moordiningsih, Faturochman., & Kim, U. *Trust to Politician: Indigenous Psychological Analysis*, Laporan penelitian: Universitas Gadjah Mada, 2010

⁸ ibid

⁹ KBBI

terhadap kebijakan Pemerintah sangat tergantung kepada tugas dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Jika kepercayaan (*trust*) masyarakat tinggi kepada Pemerintahnya, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan mudah untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Kepercayaan publik terhadap Vaksinasi COVID-19 yang dimaksud disini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah. Apakah masyarakat percaya bahwa Vaksinasi COVID-19 memang benar-benar sebagai cara yang tepat untuk menanggulangi pandemi COVID-19, atau bahkan sebaliknya.

2. Publik

Publik berasal dari kata *public* diartikan beragam dalam bahasa Indonesia tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan.¹⁰

“Publik” yang biasanya diartikan sebagai “masyarakat”, tetap dipertahankan untuk memudahkan dalam membedakan dengan istilah masa dan kerumunan. meskipun perbedaan itu sangat tipis sekali.¹¹

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun ditetaskan kedalam mulut untuk meningkatkan produk antibodi

¹⁰ Sri Suitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008) hal. 5

¹¹ Nurudin, *Komunikasi Propaganda*, cet. II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002). hlm. 52

guna menangkal penyakit tertentu¹². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Sesuai dengan pasal 13A ayat (1), “Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19” dan pasal (2), “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.”¹³

4. COVID-19

COVID-19 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2*

¹² Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah, *Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19*, *Procedeengs UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol: I No: 32. November 2021, hal. 58

¹³ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui¹⁴. *Corona* Virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.¹⁵



¹⁴ Handayani, Ririn. *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, 2020.

¹⁵ <https://www.kemkes.go.id/> (diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 04:35)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian ini dan sebagai bahan pengembangan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu administrasi negara dengan menggunakan referensi sebagai berikut:

Penelitian Saskia R Talib Jurnal Ilmu Komunikasi Tahun 2021, Universitas Sam Ratulangi Manado, persepsi masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Sumatera Selatan. “Kajian Peran Humas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Vaksin Sinovac”. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Salah satu upaya humas Sulawesi Utara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Sinovac ini dengan terus melakukan penerangan kepada masyarakat tentang vaksin Sinovac ini dengan menyebarkan terkait uji hasil penelitian terkait keamanan dan efektivitas vaksin sehingga kemudian dengan itu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk.

Humas Sulawesi Utara juga menggunakan teknik komunikasi dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin sinovac ini yaitu dengan menggunakan media sosial supaya masyarakat dapat lebih mudah dan cepat menerima informasi. Namun disamping itu

ada beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Sulawesi Utara. Yang pertama, masih banyaknya kelompok anti vaksin sehingga apapun upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Sinovac ini, pasti selalu ada berita counter dari mereka dalam bentuk berita *hoax* untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac itu berbahaya. Tantangan yang paling berbahaya dalam upaya meyakinkan masyarakat ini adalah menyeimbangkan berita *hoax* ini dengan berita yang sebenar-benarnya.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu terletak di Sulawesi utara sedangkan lokasi penelitian saat ini terletak pada Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus kepada peran Humas sedangkan penelitian saat ini berfokus kepada bagaimana kepercayaan publik terhadap vaksinasi COVID-19. Sedangkan kesamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang kedua dari Nining Puji Astuti, Jurnal Keperawatan Tahun 2021, Jawa Tengah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi COVID-19”: Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Beberapa hal yang menjadi kendala masyarakat untuk menerima vaksin, diantaranya:

¹⁶ Saskia R Talib, dkk. “Kajian Peran Humas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Vaksin Sinovac” (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021) hal, 4.

yang pertama, tingkat pendapatan (ekonomi). Jika Orang yang berpenghasilan tinggi, lebih mungkin untuk menanggapi pertanyaan umum secara positif daripada orang yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dikaitkan secara positif dalam penerimaan dan menanggapi vaksin. Yang ketiga yaitu peran Pemerintah. Seseorang yang mengatakan bahwa mereka mempercayai Pemerintah mereka, akan lebih cenderung menerima vaksin daripada mereka yang mengatakan tidak. Selain itu, jika seseorang mempercayai Pemerintah, mereka lebih cenderung menanggapi secara positif rekomendasi vaksin.¹⁷

Keragu-raguan yang muncul dari masyarakat disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Dalam menangani keragu-raguan vaksin COVID-19 yang meluas mengharuskan adanya kolaborasi dalam upaya Pemerintah, termasuk media sosial yang direkomendasikan untuk membangun kepercayaan vaksinasi COVID-19 dalam kalangan umum publik. mengatasi keragu-raguan vaksin membutuhkan lebih dari sekadar membangun kepercayaan. Ini adalah upaya multifaktorial, kompleks dan bergantung pada konteks yang harus ditangani secara bersamaan di tingkat global, nasional dan subnasional.

Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada fokusnya. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana persepsi dan penerimaan masyarakat tentang vaksinasi

¹⁷ Nining Puji Astuti, dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19". *Jurnal Keperawatan* Volume 13 No. 3, September 2021, hal. 574

COVID-19 ini. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sedangkan kesamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang vaksinasi COVID-19 di tengah masyarakat.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah dari Susi Artuti Erda Dewi, Jurnal Ilmu Komunikasi Tahun 2021, "Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi COVID-19". Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Keberhasilan program vaksinasi COVID-19 bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor itu adalah komunikasi publik. Komunikasi publik yang dipersiapkan dengan akurat, tuntas, strategi yang matang, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan akan memberikan pengaruh positif pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat.¹⁸

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang terakhir dengan penelitian yang sekarang adalah, yang pertama perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang terakhir berfokus pada strategi komunikasi yang tepat digunakan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan penelitian saat ini fokus membahas tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

¹⁸

Susi artuti. "Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid-19". Jurnal Komunikasi Volume 10 No. 1, Juni 2021, hal. 165

Penelitian ini sebagai tugas akhir Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, penelitian ini berfokus pada kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian terdahulu diatas dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak beberapa perbedaan serta persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. persamaannya yaitu seperti beraneka ragamannya persepsi masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 ini, tugas yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam mengupayakan kesuksesan kebijakan vaksin ini, serta berbagai kendala yang dihadapi. Sedangkan jika membahas perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang tentunya terdapat pada daerah serta beberapa pihak yang bertugas dalam menangani permasalahan ini.

2.2 Teori Kepercayaan Publik

1. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.¹⁹ Dasgupta menyatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan

¹⁹

Martin Veno H dan Dr. Hartono Subagio, *Analisis Pengaruh Kepercayaan terhadap tenaga penjual (trust in employee), dan kepercayaan terhadap merek (trust in brand) terhadap niat beli (purchase intention) konsumen pada Berninin furniture di Surabaya dan Semarang*, 2013. Vol. 1, No. 2

tertentu yang saling berhubungan. Pada tingkat individu, anda mempercayai seorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang anda ketahui tentangnya, disposisi, kemampuannya, reputasi dan sebagainya tidak hanya karena dia bilang dia akan melakukannya. Pada tingkat kolektif, jika anda tidak percaya suatu badan atau organisasi dengan mana individu berafiliasi, anda tidak akan percaya padanya untuk membuat kesepakatan atau kerja sama.²⁰

Menurut Moordiningsih, kepercayaan (*trust*) di Asia Timur, kepercayaan merupakan konsep relasional bukan individual. Ia tidak berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi individu. Kepercayaan adalah konsep yang mengandung harmoni, jaminan, dan kesejahteraan untuk individu dan komunitas. Kepercayaan dikembangkan mulai dari keluarga, dalam kelekatan hubungan orang tua dan anak. Kemudian kepercayaan berkembang dalam lingkungan kerabat dan teman dekat.²¹

Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak

²⁰

ibid

²¹Moordiningsih, Faturochman., & Kim, U. *Trust to Politician: Indigenous Psychological Analysis*, Laporan penelitian: Universitas Gadjah Mada, 2010

sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen²². Sedangkan menurut KBBI, kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata²³.

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan seseorang kepada orang lain dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sama halnya dengan keadaan sekarang ini, mengenai kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat tergantung kepada tugas dan kewajiban yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jika kepercayaan masyarakat tinggi kepada pemerintahnya, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan mudah untuk mencapai target yang telah direncanakan.

2. Publik

“Publik” diartikan sebagai, “umum, orang banyak, masyarakat dan negara”. Akan tetapi, secara sosiologi, istilah publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sementara itu, publik adalah kumpulan orang-orang yang

²² Ibid

²³ KBBI

menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu.²⁴

Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center mengatakan: “ *A public is a collective noun for a group of individuals tied together by some common kinds of interest and sharing sense of togetherness*”

“Publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagai rasa atas dasar kebersamaan”²⁵

3. Kepercayaan Publik

Menurut Lijeblad et al., dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik, “Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya”, pertama, kepercayaan diukur atau dinilai dari responsivitas, integritas dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat melalui kebijakan yang dibuat. Kedua, penilaian kepercayaan yang dapat dibangun melalui kinerja, perilaku maupun kebijakan yang dapat memberikan alasan bagi masyarakat untuk mempercayai pemerintah. Terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun kebijakan yang dibuat ialah melalui efektivitas kinerja pemerintah atau kebijakan yang dibuat dan keandalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat.²⁶

²⁴ Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jatinangor: Erlangga, 2012), hal. 14

²⁵ Ibid, hal 15.

²⁶ Arimurti Kriswibowo, *Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan vaksinasi COVID-19 Di Kota Surabaya*, 2019. Vol. 4 No.2

2.3 Konsep Vaksinasi

a. Manfaat Vaksinasi

Melalui situs-situs resmi Pemerintah, mengutarakan ada 4 (empat) manfaat dari vaksinasi covid-19. Yaitu:

1. Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh

Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.

2. Mengurangi Risiko Penularan

Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

3. Mengurangi Dampak Berat dari Virus

Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

4. Mencapai Herd Immunity

Semakin banyak masyarakat yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai,

sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19.²⁷

2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19.

Sesuai dengan pasal 13A ayat (1), “Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19” dan pasal (2), “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.”²⁸

a. Teori Interaksi Sosial

Johnson mengatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu-dengan individu lainnya, individu dengan

²⁷ <https://upk.kemkes.go.id>. (diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 21:56)

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

kelompok dengan sebaliknya. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat memproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan interaksi sosial dapat pula diandaikan dengan apa yang disebut Weber sebagai tindakan sosial individu yang secara subjektif diarahkan kepada orang lain.²⁹

Begitu juga dengan Pemerintah melalui tim gugus tugas Aceh yang berusaha membangun interaksi dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah guna untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Keduanya memiliki hubungan timbal balik, yang mana Pemerintah menjalankan visi dan strategi menangani COVID-19 sedangkan masyarakat menerima vaksin untuk membentengi diri mereka dari wabah virus COVID-19.

Hal senada juga disampaikan oleh Thibaut dan Kelly bahwa interaksi sosial sebagai peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain³⁰. Untuk mencapai target vaksinasi COVID-19 ini, tentu Pemerintah membutuhkan strategi yang tepat untuk membangun interaksi sosial yang baik terhadap masyarakat supaya masyarakat mengikuti kebijakan vaksinasi ini demi menekan angka kasus COVID-19. Tim

²⁹ Sayed Amirulkamar, 2017, Kebijakan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, edisi ke-1, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh(NASA),2017)

³⁰ Ibid.

gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mempengaruhi masyarakat untuk mau mengikuti vaksinasi COVID-19 agar supaya masyarakat benar-benar terbebas dari wabah ini.

b. Teori Komunikasi

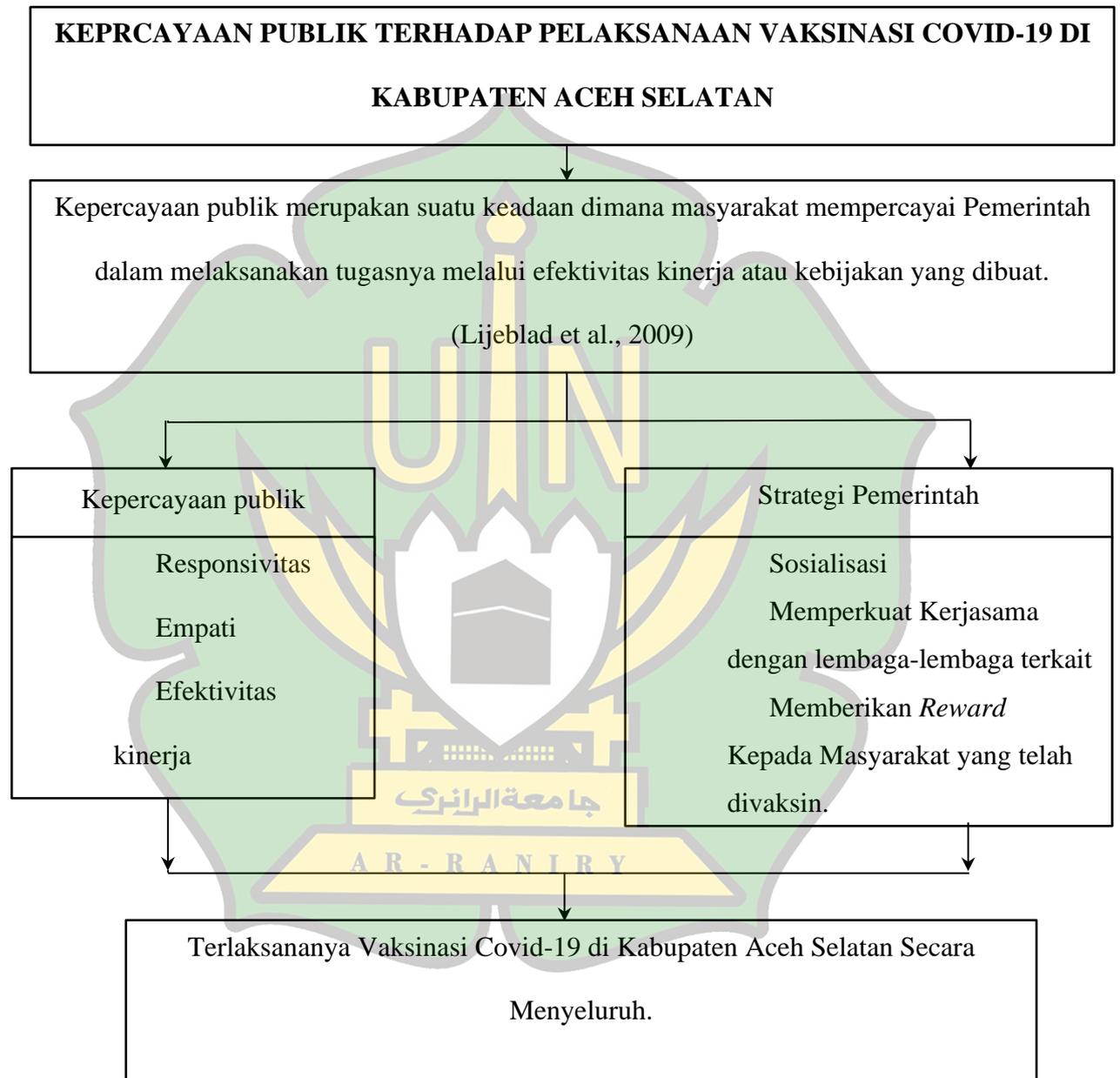
Pengertian komunikasi menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss adalah, komunikasi merupakan proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih.³¹ Dengan arti, komunikasi tidak hanya sebatas interaksi satu arah saja melainkan juga sebagai suatu proses interaksi dua arah. Suatu komunikasi itu dikatakan efektif apabila makna yang diterima oleh komunikan sama dengan makna pesan yang diterima oleh komunikator.

Dalam hal mencapai target vaksinasi COVID-19 ini, komunikasi menjadi senjata handal untuk membuat masyarakat patuh melakukan vaksinasi. Pemerintah perlu mengambil langkah komunikasi yang efektif dan strategis sehingga dapat menurunkan tingkat apatis masyarakat. komunikasi ini bertujuan untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah atau kurangnya informasi.

³¹

Prof. Deddy Mulyana, MA, Ph.D, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 76

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat di lapangan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti nantinya bermaksud untuk memperoleh gambaran terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian pula pemahaman peneliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sesuai sebagaimana Rakhmat menyebutkan sebagai berikut:

Deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.³²

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan dalam setiap penelitian agar adanya pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian lapangan sehingga seorang peneliti tidak kelabakan atau kehilangan arah sebelum memperoleh

³² Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011

hasil akhir penelitian itu sendiri. Fokus ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melihat gejala dan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lapangan dengan mengklasifikasi, memilih hasil yang diperoleh dan diambil yang bersifat urgen.

Dalam penelitian kualitatif ada berbagai pendapat yang disampaikan para ahli kualitatif, namun secara umum fokus penelitian sebagaimana Moleong menyebutkan sebagai berikut:

Fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. *Implikasinya*, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mengalami kepustakaan yang *relevan* sebelum terjun kelapangan. Dengan jalan demikian fokus penelitian akan memenuhi kriteria untuk bidang *inkuiri* yaitu kriteria *inklusi-inklusi* atau *implikasi* yang lain memanfaatkan paradigma.³³

33

Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-32. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017

1. Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 3.1.

Kepercayaan publik masyarakat Aceh Selatan

| No | Dimensi | Indikator |
|----|---------------------|---|
| 1 | Responsivitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan merespon masyarakat b. Kecepatan melayani c. Ketepatan melayani d. Kecermatan melayani e. Ketepatan waktu pelayanan f. Kemampuan menanggapi keluhan |
| 2 | Empati | <ul style="list-style-type: none"> a. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. b. Peran yang dilakukan |
| 3 | Efektivitas Kinerja | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterampilan b. Keahlian c. Prestasi kerja |

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

2. Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi COVID-19

Tabel 3.2.

Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik

| No | Dimensi | Indikator |
|----|---------------|---|
| 1 | Sosialisasi | a. Komunikasi b. Media c. Konsisten |
| 2 | Kerjasama | a. Lembaga b. Pengembangan vaksinasi |
| 3 | <i>Reward</i> | a. keadilan b. pemerataan |

Sumber: Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebenarnya sebagai objek dan/atau tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dikonsentrasikan di Kabupaten Aceh Selatan.

Penulis memilih Kabupaten Aceh Selatan sebagai lokasi penelitian karena di Kabupaten Aceh Selatan masih rendahnya kepercayaan masyarakat

terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga menimbulkan banyak spekulasi negatif mengenai Vaksinasi COVID-19 dan angka vaksinasi hingga tanggal 09 Februari 2022 masih mengalami naik turun dengan rincian persentase vaksin 1 Sinovac 76,3%, vaksin 2 Sinovac 31,7% dan vaksin 3 Sinovac 1,3%. Nama seiring berjalannya waktu dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan cakupan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan, semakin hari menunjukkan angka yang semakin tinggi. Yaitu sebagaimana yang tertera dalam data Vaksinasi COVID-19 Mei 2022:

Tabel 3.3.

Rekapitulasi dan Pemetaan Vaksinasi COVID-19 di Aceh Senin,23 Mei 2022

| No | Kabupaten/Kota | Target | Status V1 | % | Status V2 | % | Status V3 | % |
|----|------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | Realisasi | | Realisasi | | Realisasi | |
| 1 | Kota Banda Aceh | 218882 | 236939 | 108,2% | 175724 | 80,3% | 38942 | 17,8% |
| 2 | Bener Meriah | 140487 | 145420 | 103,5% | 118956 | 84,7% | 36201 | 25,8% |
| 3 | Kota Lhokseumawe | 165321 | 170996 | 103,4% | 119805 | 72,5% | 25634 | 15,5% |
| 4 | Aceh Besar | 353604 | 320301 | 90,6% | 225423 | 63,8% | 49501 | 14% |
| 5 | Kota Langsa | 164559 | 146309 | 88,9% | 120201 | 73% | 30716 | 18,7% |
| 6 | Aceh Jaya | 81043 | 71517 | 88,2% | 58930 | 72,7% | 15075 | 18,6% |
| 7 | Pidie Jaya | 139406 | 122504 | 87,9% | 97701 | 70,1% | 20498 | 14,7% |
| 8 | Simeulue | 81746 | 71871 | 87,9% | 60790 | 74,7% | 18096 | 22,1% |
| 9 | Aceh Timur | 262669 | 319393 | 87,8% | 225021 | 61,9% | 36297 | 10% |
| 10 | Aceh Barat Daya | 133169 | 116622 | 87,6% | 98403 | 73,9% | 21705 | 16,3% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 11 | Kota Subulussalam | 77434 | 67836 | 87,6% | 56152 | 72,5% | 11830 | 15,3% |
| 12 | Aceh Tenggara | 194237 | 170036 | 87,5% | 122351 | 63% | 21922 | 11,3% |
| 13 | Aceh Singkil | 108915 | 93810 | 86,1% | 72477 | 66,5% | 16071 | 14,8% |
| 14 | Kota Sabang | 35872 | 30887 | 86,1% | 27653 | 77,1% | 10826 | 30,2% |
| 15 | Nagan Raya | 148861 | 127416 | 85,6% | 95628 | 64,2% | 13529 | 9,1% |
| 16 | Aceh Barat | 175697 | 148592 | 84,6% | 118754 | 67,6% | 33924 | 19,3% |
| 17 | Pidie | 385148 | 325096 | 84,4% | 248464 | 64,5% | 29661 | 7,7% |
| 18 | Bireun | 379201 | 317048 | 83,6% | 237856 | 62,7% | 29222 | 7,7% |
| 19 | Aceh Tamiang | 257901 | 215026 | 83,4% | 181983 | 70,6% | 36218 | 14% |
| 20 | Aceh Selatan | 206783 | 172468 | 83,4% | 130755 | 63,2% | 23018 | 11,1% |
| 21 | Aceh Tengah | 187473 | 156320 | 83,4% | 128873 | 68,7% | 28190 | 15% |
| 22 | Gayo Lues | 86082 | 71731 | 83,3% | 58900 | 68,4% | 10586 | 12,3% |
| 23 | Aceh Utara | 525330 | 429028 | 81,7% | 321248 | 61,2% | 44949 | 8,6% |

Sumber: Tim Gugus Tugas COVID-19

Dari data tersebut dapat dilihat data Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan. Pada Vaksin pertama sudah mencapai 83,4% yang artinya angka ini sudah dapat dikatakan tinggi. Kemudian pada Vaksin kedua terlihat penurunan jumlah dari Vaksin sebelumnya yaitu hanya 63,2%. Begitu juga pada Vaksin ketiga yang angka persentasenya semakin rendah yaitu 11,1%. Dengan melihat data Vaksinasi COVID-19 kabupaten Aceh Selatan tersebut, perlu kiranya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencari tahu apa yang membuat data tersebut mengalami penurunan dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu mengambil langkah strategis untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

3.4. Jenis dan sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua. Yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Secara umum, jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan) dan dokumen-dokumen. Sehingga jenis data dan sumber data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini bersifat kata-kata, tindakan dan selebihnya sebagai data tambahan berupa dokumen dan data lainnya, sehingga kesenyawaan jenis dan sumber data dimaksud berupa:

1. Data Primer

Dalam perkembangan penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada dilapangan sesuai kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung (pengamatan langsung) dilapangan atau dimana lokasi penelitian dilakukan maupun kegiatan sehubungan kebutuhan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Informan yang sudah dipilih.

Bila dicermati lebih dalam lagi keberadaan sumber data primer menurut Sugiyono merupakan “Sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data”.³⁴ Sedangkan dalam pemahaman data primer sebagaimana

³⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016

Moleong menyebutkan bahwa "Data primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti".³⁵

Sebagai acuan dasar maka dalam hal ini dilakukan agar adanya suatu kepastian personal peneliti maupun kepuasan terhadap data maupun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri terutama Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan. Sejalan dengan perkembangan ini, data primer mampu memberikan data secara konstan agar mampu mendeteksi sumber yang langsung diterima.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁶ Kemudian data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip serta media lainnya yang dapat memberikan informasi terkait Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

³⁵ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2017

³⁶ Misbahul Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi 2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal.21

3.5. Informan Penelitian

Tabel 3.5.
Informan penelitian

| No | Nama | Keterangan | Jumlah |
|----|------------------|--|----------------|
| 1 | Lia Afrisa Janan | Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi | 1 (satu) Orang |
| 2 | Siti Amanda | Masyarakat Berpendidikan Formal yang Divaksin | 1 (satu) Orang |
| 3 | Zahara | Masyarakat Berpendidikan Formal yang Tidak Divaksin | 1 (satu) Orang |
| 4 | Isma | Masyarakat Berpendidikan Non Formal yang Divaksin | 1 (satu) Orang |
| 5 | Nur Aini | Masyarakat Berpendidikan Non Formal yang Tidak Divaksin | 1 (satu) Orang |
| 6 | Cut Ida | Ibu Rumah Tangga yang Divaksin | 1 (satu) Orang |
| 7 | Nurma Astuti | Ibu Rumah Tangga yang Tidak Divaksin | 1 (satu) Orang |

Sumber: Data diolah tahun 2022

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan peneliti sebagai upaya memperoleh data yang diinginkan sesuai kebutuhan penelitian di lapangan, sehingga sebagaimana pendapat Grout and Comte dalam Sutopo menyebutkan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari

beberapa jenis. Bisa manusia, peristiwa, lokasi, benda serta dokumen atau arsip”³⁷. Oleh karenanya dalam metode interaktif, peneliti sengaja memilih wawancara mendalam dan observasi langsung partisipasi pasif, sedangkan metode yang bersifat non interaktif peneliti lebih berorientasi.

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Teknik atau metode ini digunakan untuk memperoleh data primer. Informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, tim gugus tugas covid-19, tenaga medis, masyarakat dari kalangan ASN, masyarakat umum, masyarakat yang berpendidikan formal dan masyarakat yang berpendidikan informal.

2) Pengamatan (*Observasi*)

Teknik atau metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena yang menjadi fokus penelitian. Untuk penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19.

3) Dokumentasi

³⁷

Ariesto Hadi Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Teknik atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang sudah diolah atau yang sudah tersedia di lokasi penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).³⁸ Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang didapat mengenai kepercayaan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

Analisis data dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan makna yang terkandung di dalam data-data yang didapatkan. Dalam menganalisis data diperlukan pikiran yang jernih, kemampuan intelektual yang tinggi serta kreatifitas untuk dapat menghubungkan dan membangun interpretasi yang kaya keilmuan dan pengalaman.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan

³⁸ Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Lebih spesifik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan jalan/cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan narasumber/informan penelitian yang lain.³⁹

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil

³⁹ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman/transkrip wawancara, foto-foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.⁴⁰



⁴⁰ Iwan fasadi. Proposal. *Kualitas Personil Dalam Rangka Pelayanan Kepolisian Negara pada Polisi Sektor (POLSEK) Simpang Tiga Polres Aceh Besar*, Universitas Iskandar Muda. Banda Aceh. 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Aceh, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam, baik potensi yang di darat maupun potensi kelautan beserta isinya.⁴¹

Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah ujung selatan Provinsi Aceh yang terletak antara 20-40 Lintang Utara (LU) dan 960-900 Bujur Timur (BT). Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan dan 260 gampong dari total 5.827 gampong di seluruh Aceh. Adapun batasan-batasan Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

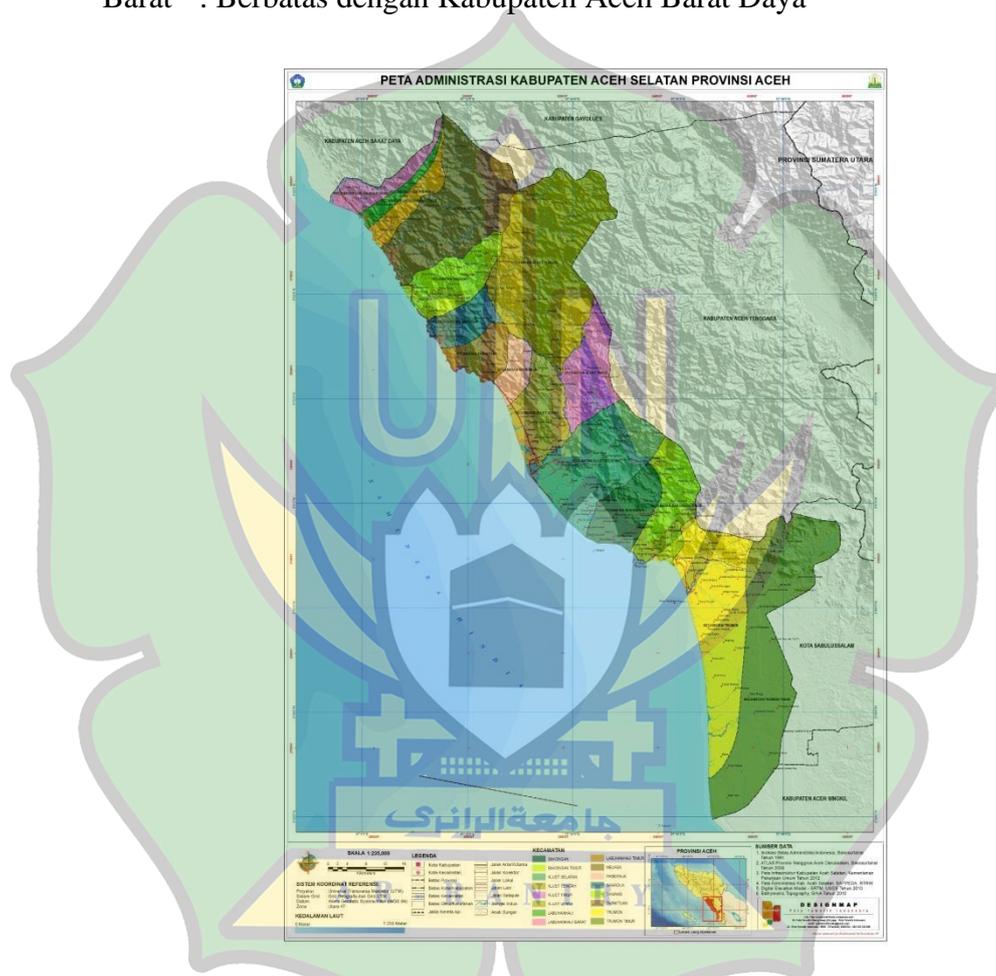
Utara: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues

⁴¹ <http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan> (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 19:16)

Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam

Selatan: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Samudera Indonesia

Barat : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya⁴²



Gambar 4.1. Letak Geografis

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan Terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan yaitu:

1. Bakongan

⁴²

RKPK Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019, hal 8.

2. Bakongan Timur
3. Kluet Utara
4. Kluet Selatan
5. Kluet Tengah
6. Kluet Timur
7. Kota Bahagia
8. Labuhan Haji
9. Labuhan Haji Timur
10. Labuhan Haji Barat
11. Meukek
12. Pasie Raja
13. Sama Dua
14. Sawang
15. Tapak Tuan
16. Trumon
17. Trumon Tengah
18. Trumon Timur



Kaitan data tersebut dengan penelitian ini adalah dapat mengetahui secara geografis mengenai Kabupaten Aceh Selatan sehingga akan memudahkan untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan di setiap kecamatan.

4.1.2 Bahasa yang Digunakan Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan

Di Kabupaten Aceh Selatan masyarakatnya tidak hanya menggunakan 1 bahasa. Akan tetapi terdapat tiga suku yang sudah semenjak lama menetap dan menjadi masyarakat Kabupaten Aceh selatan sehingga Aceh Selatan memiliki 3 bahasa yang sangat mudah dijumpai yaitu bahasa Aceh, bahasa Kluet dan bahasa Jamee.

1. Bahasa Aceh

Bahasa Aceh adalah bahasa yang digunakan masyarakat aceh sehari-hari termasuk masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Bahasa Aceh memiliki penutur paling banyak dibandingkan dengan bahasa daerah Aceh lainnya. Masyarakat suku Aceh yang menggunakan Bahasa Aceh pada umumnya dapat dimengerti oleh suku lainnya di Aceh karena bahasa Aceh sebagai lambang kebanggaan masyarakat Aceh.

2. Bahasa Kluet

Bahasa Kluet atau Kluat merupakan anak dari Bahasa Gayo dan Bahasa Alas karena orang dari suku Kluet mengerti dengan Bahasa Gayo dan Bahasa alas. Dan ada beberapa kata dalam bahasa Kluet yang mirip dengan bahasa suku Karo di Sumatera Utara. Bahasa ini hanya terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan-kecamatan di Aceh Selatan dengan bahasa Kluet sebagai bahasa pengantar yang dominan ditandai dengan nama awal kecamatan memakai kata 'Kluet', seperti Kecamatan Kluet Utara,

Kluet Selatan, Kluet Timur, dan Kluet Tengah. Bahasa Kluet memiliki tiga dialek yaitu Manggamat, Krueng Kluet, dan Paya Dapur.

3. Bahasa Jamee

Bahasa Jamee atau bahasa Aneuk Jamee adalah bahasa yang umumnya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Bahasa ini merupakan bahasa pengantar utama di kota Tapaktuan. Jamee dalam bahasa Aceh artinya Tamu, jadi bahasa Jamee adalah bahasa tamu yang sudah menjadi salah satu bahasa daerah Aceh di Kabupaten Aceh Selatan, bahasa tamu yang ini sangat mirip dengan bahasa padang karena dibawa oleh keturunan perantau Minangkabau yang tersebar di sepanjang pesisir Barat dan Selatan Aceh.⁴³

Sebagaimana yang penulis sampaikan bahwasannya di Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 bahasa utama yang digunakan sebagai sarana komunikasi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Namun tidak semua masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan bisa menguasai ketiga bahasa tersebut bahkan masih ada sebahagian masyarakat yang belum begitu menguasai bahasa Indonesia sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai Vaksinasi COVID-19 menggunakan bahasa masing-masing dari masyarakat tersebut supaya pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan tepat.

⁴³

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/> (Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 13:37)

4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan

Saat ini Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh Seorang Bupati yang bernama Tgk. Amran yang sebelumnya beliau adalah Wakil Bupati. Namun akhirnya beliau dilantik menjadi Bupati Aceh Selatan menggantikan H. Azwir, S.Sos yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2019 lalu di Rumah Sakit National University Hospital Singapura. Dibawah pimpinan Tgk. Amran, Aceh Selatan memiliki visi, misi dan program unggulan, sebagai berikut:

1. 11 Program Unggulan



Gambar 4.2. 11 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan

2. Visi

Terwujudnya Aceh Selatan yang Berkeadilan Secara Sosial dan Ekonomi.

3. Misi

- 1) Mewujudkan nilai-nilai syariat Islam dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat

- 2) Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional
- 3) Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi
- 4) Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien
- 5) Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi Pemerintah
- 6) Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan
- 7) Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa
- 8) Penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
- 9) Mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif
- 10) Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁴

4.1.4 Demografi Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh, suku Aneuk Jamee dan suku Kluet. Suku Aceh adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Aceh selatan yang sehari-hari menggunakan bahasa Aceh dalam berkomunikasi. Sedangkan suku Aneuk Jamee merupakan para

44

<http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/> (diakses pada 4 Juni 2022 pukul 15:54)

perantau Minangkabau yang telah bermukim di sana sejak abad ke-15 yang menggunakan bahasa Minangkabau dalam berkomunikasi.

Sedangkan Suku Kluet bangsa yang unik, mengingat mereka memiliki budaya yang berbeda dari suku bangsa yang lainnya. Dalam percakapan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa kluet asli.⁴⁵

4.2. Pembahasan

4.2.1 Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan

Setelah jumlah kasus COVID-19 di Aceh khususnya Aceh selatan semakin meningkat, membuat pemerintah daerah pun semakin gencar menyuarakan bahaya COVID-19 dan menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan Vaksinasi COVID-19. Untuk mendorong pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berjalan dengan efektif, maka diperlukannya dukungan aktif dari masyarakat kabupaten Aceh Selatan melalui kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintah serta ikut berpartisipasi dalam kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepercayaan publik dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menjadi modal utama dalam keberhasilan target capaian Vaksinasi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Vaksinasi sendiri merupakan pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif

⁴⁵

Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh selatan*, Vol. 14 No.1, 2011. Hal.124

terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁴⁶

Pencegahan dan penanggulangan bencana COVID-19 ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penanggulangan COVID-19 ini mestinya berbasis masyarakat. artinya, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan antusias dari masyarakat. Namun, kepercayaan masyarakat di masa pandemi ini semakin menurun sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Kepercayaan publik yang rendah menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima informasi dari pemerintah dan sulit untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika awal isu Vaksinasi ini hadir, mulai menimbulkan keraguan dan ketakutan di tengah masyarakat. keraguan dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat terbentuk dari informasi negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena rasa ragu dan takut tersebut membuat sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Selatan belum memberikan dukungan bahkan enggan untuk divaksin.

⁴⁶

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 poin 9.

Bahkan ketika pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan menghimbau masyarakatnya untuk melakukan Vaksinasi COVID-19, masyarakat melakukan penolakan secara terang-terangan. Sehingga membuat pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan membuat beberapa strategi agar pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan berhasil.

Mulai dari melakukan edukasi melalui sosialisasi dan spanduk pentingnya Vaksinasi COVID-19, mengajak TNI, Polri dan MPU untuk bekerjasama menyukseskan Vaksinasi COVID-19, memberikan reward kepada masyarakat yang telah melakukan Vaksinasi, menahan bantuan BLT bagi masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi serta tidak akan melayani urusan administrasi masyarakat yang belum divaksin. Dengan diterapkannya strategi tersebut, membuat cakupan target Vaksinasi COVID-19 semakin meningkat.

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak ketinggalan dalam menjalani tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan. Adapun indikator responsivitas menurut Sugiandi adalah:

1. Kemampuan Merespon Masyarakat

Setiap masyarakat ingin dilayani dengan baik. Oleh karena itu pelayan publik dituntut untuk dapat memahami masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda tersebut dengan baik.

2. Kecepatan Melayani

Kecepatan disini dimaksudkan adalah sigap menjawab pertanyaan atau permintaan dari masyarakat.

3. Ketepatan Melayani

Pelayanan dengan tepat itu adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan keinginan masyarakat.

4. Kecermatan Melayani

Kecermatan dalam melayani yaitu petugas memberikan pelayanan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat.

5. Ketepatan Waktu Pelayanan

Maksud dari ketepatan waktu pelayanan adalah petugas dapat menyelesaikan pelayanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

6. Kemampuan Menanggapi Keluhan

Setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyelesaikan pengaduan maupun keluhan masyarakat mengenai

ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya.⁴⁷

Kemudian hal ini juga sejalan peneliti wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan pertama apakah Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengalami efek samping dari Vaksin COVID-19?

“Dalam hal ini bukan Dinas Kesehatan saja yang bertanggung jawab. Ada namanya POKJA KIPI. Terdiri dari hampir seluruh pejabat pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Yang diketuai sendiri oleh Bupati Aceh Selatan wakilnya Dokter spesialis dalam, ada KAPOLRES, DANDIM, ketua DPR dan seluruh Dokter spesialis yang ada di rumah sakit serta seluruh Dokter yang ada di setiap Puskesmas dan hal ini tertuang dalam SK Bupati”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengalami efek samping dari Vaksin COVID-19. Namun bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang akan bertanggung jawab tetapi juga pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diketuai langsung oleh Bupati Aceh Selatan, hal itu tertuang dalam

⁴⁷ Rasdiana, Riski Ramadhani. *Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*, Vol. XVII, 2021, 249-264, Jurnal Administrasi Publik, 2021, hal. 6

⁴⁸ Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

SK Bupati Aceh Selatan Tahun 2021. Selain itu, KAPOLRES, anggota DPR dan Dokter spesialis di rumah sakit juga ikut bertanggung jawab dan turun tangan.

Untuk mengetahui pendapat, keadaan dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan peneliti mengajukan pertanyaan pertama kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Saat pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 apakah masyarakat dilayani dengan baik?

“Alhamdulillah di kampung kami, tertib. Tapi waktunya ngaret. Sehari sebelum vaksinasi diumumkan di masjid mulai pelaksanaan vaksinnya jam 09: 30, tapi ketika kami tiba di puskesmas, ternyata petugas nya belum siap. Jadi akhirnya mulai sekitar jam 10”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berjalan dengan tertib akan tetapi yang menjadi keluhan bagi masyarakat adalah waktu pelaksanaannya yang terkadang tidak sesuai dengan pemberitahuan awal. Namun, ketika peneliti mewawancarai dengan masyarakat lain dari kalangan santri, petugas pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 langsung yang datang ke Dayah mereka sehingga para santri tidak perlu keluar dari Dayah hanya untuk mendapatkan Vaksin COVID-19.

⁴⁹

Wawancara dengan Nurma Astuti, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Agustus 2022

Pertanyaan kedua selanjutnya peneliti tanyakan dengan masyarakat, apakah informan pernah merasakan efek samping dari Vaksin COVID-19? Dan apakah puskesmas sekitar bertanggung jawab akan hal itu?

“Pernah. Cuma lemas dan terus mengantuk selama 3 hari. Tapi saya tidak pergi berobat ke puskesmas karena efek samping yang saya rasakan tidak berat dan sebelum itu juga saya tidak tahu kalau puskesmas akan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena efek samping dari Vaksin COVID-19”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa petugas pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 akan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena efek samping dari Vaksin COVID-19. Informasi yang sering diterima oleh masyarakat adalah tentang seruan Vaksinasi COVID-19, pentingnya Vaksinasi COVID-19 dan bahaya COVID-19.

Sedangkan mengenai pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena efek samping dari Vaksin COVID-19 kurang menjadi fokus sehingga masyarakat banyak yang tidak tau dan bagi sebagian masyarakat yang tidak mau divaksin itu juga menjadi alasan bagi

⁵⁰

Wawancara dengan Zahara, Masyarakat Kabupaten Aceh selatan pada tanggal 25 Agustus 2022

mereka karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak merasa dijamin kesehatannya.

2. Empati

Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog, Rogers menjelaskan mengenai empati, yang menekankan bahwa empati bukanlah suatu "state" yang memiliki sifat tetap, tetapi suatu proses. Dia menambahkan penjelasan bahwa empati memiliki beberapa fase, yakni bersifat pribadi, melibatkan sensitivitas, dan mengkomunikasikan perasaan. Kita perlu mengesampingkan pandangan sendiri agar dapat memahami perasaan orang lain, namun tidak berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian.⁵¹

Hal sejalan juga peneliti wawancara dengan Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan kedua Bagaimana anda melihat keadaan masyarakat yang merasa resah dan takut dengan Vaksinasi COVID-19?

“Kami pribadi merasa sedih karena kekhawatiran masyarakat ini sebenarnya adalah suatu hal yang tidak mendasar. Sehingga kami berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dengan gencar mengkampanyekan Vaksinasi COVID-19 dengan sebaik yang kami bisa.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan

⁵¹ Darmiyati Zuchdi, *Empati dan Keterampilan Sosial*, (Cakrawala Pendidikan: 2003), hal. 52

⁵² Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan ikut merasa sedih dengan keadaan awal masyarakat yang merasa khawatir dan ketakutan saat Vaksinasi COVID-19 mulai diwajibkan di Aceh Selatan. Karena masyarakat merasa terancam, pihak Dinas Kesehatan mulai berusaha untuk memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat bahwa Vaksinasi COVID-19 aman dan dibuat untuk kebaikan bagi masyarakat itu sendiri.

Hal terkait juga peneliti wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dengan pertanyaan ketiga Menurut anda apakah Vaksinasi COVID-19 ini merupakan upaya yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19?

“Menurut saya, tidak. karena banyak saudara-saudara saya yang tidak divaksin COVID-19 tapi mereka tidak terkena COVID-19. Saya dan keluarga dulu juga divaksin COVID-19 karena ingin berangkat ke luar Aceh jadi naik pesawat harus sudah punya surat vaksin”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan melakukan Vaksinasi COVID-19 karena tidak ingin kebutuhan dan keperluan administrasi tertahan dikarenakan segala urusan administrasi tidak dapat dijalankan apabila masyarakat yang bersangkutan belum memiliki kartu vaksin sebagai

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah semenjak wabah virus COVID-19.

Oleh sebab itu yang belum mengikuti Vaksinasi COVID-19 akan dikenakan sanksi administratif Sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019.

3. Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja merupakan kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan manusia untuk memberikan sesuatu yang diharapkan, juga untuk memilih tujuan yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁴ Efektivitas kinerja menjadi salah satu indikator timbulnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika selama ini masyarakat melihat kerja pemerintahnya sesuai dan mampu mencapai keberhasilan, maka masyarakat pun akan ikut percaya bahwa pemerintahnya benar-benar amanah dalam bekerja. Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 36 tahun 2021 Tentang Standar Biaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menjadi acuan dalam dalam penanganan COVID-19.

54

Nursanti Jamaluddi, *Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Penggunaan Sistem Kearsipan Berbasis Elektronik Di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hal. 15



Gambar 4.3. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan di SDN 1 Tapak Tuan.

Pertanyaan ketiga peneliti tanyakan kepada Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan yaitu apa saja peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19?

“Peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini, dari pertama kami menyiapkan fasilitas kesehatan, mengecek kesehatan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi termasuk melakukan simulasi, mengecek tenaga kesehatannya, vaksinatornya, melatih vaksinator dan menyiapkan tempat serta alat penyimpanan vaksin. Kemudian kami memesan vaksin ke Provinsi. Setelah Dinas Kesehatan Kota mendistribusikan ke setiap fasilitas kesehatan. Kemudian saat pelaksanaan di fasilitas kesehatan, kami melakukan pendampingan untuk memantau pelaksanaan dari vaksinasi itu apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas kesehatan Kabupaten Aceh selatan dalam pelaksanaan vaksinasi ini tidak hanya

55

Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada 23 Agustus 2022

menyiapkan dan memastikan kecukupan vaksin bagi masyarakat saja, akan tetapi juga memastikan fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2021 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: “Fasilitas layanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.”⁵⁶

Hal terkait juga peneliti tanyakan kepada Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan keempat, apakah masyarakat telah divaksin sesuai dengan prosedur yang tepat dan sebagaimana mestinya? Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ini kami telah melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin. Dari memastikan fasilitas perlengkapan vaksin, tenaga kesehatannya sampai saat vaksin diberikan kepada masyarakat. pada saat vaksin kami berikan kepada masyarakat, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan fisik untuk mengetahui kondisi fisik masyarakat. apakah masyarakat tersebut memiliki penyakit yang tidak dibolehkan untuk melakukan vaksin atau tidak, kemudian setelah masyarakat tersebut dinyatakan sehat, maka barulah proses vaksin dilakukan”*⁵⁷

⁵⁶ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada 23 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian vaksin kepada masyarakat telah dilakukan secara maksimal dan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan kelima, Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ini?

“Pertama kami melakukan sosialisasi, kami berikan edukasi pemahaman tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Kemudian dari pihak TNI dan POLRI juga melakukan sosialisasi mengajak masyarakat untuk tidak takut melaksanakan vaksinasi COVID-19 setelah masyarakat mengikuti vaksinasi, maka mereka akan diberikan hadiah seperti sembako. Untuk anak-anak sekolah, awal-awalnya akan diberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 seperti tidak dibenarkan untuk mengikuti sekolah tatap muka. Kalau untuk PNS sendiri bagi yang tidak vaksin akan ada penahanan sementara untuk TC, tidak boleh bekerja. Dan untuk masyarakat yang tidak mampu, tidak diberikan bantuan sosial. Alhamdulillah dengan cara seperti itu cakupan kami meningkat”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa dari pihak Dinas

58

Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan bersama TNI dan POLRI gencar melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya Vaksinasi Covid-19 ini dalam menangani wabah yang tengah melanda di negeri ini. Bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang tidak mau melakukan Vaksinasi COVID-19 akan diberikan sanksi. Seperti sanksi administrasi, tidak diperbolehkan bersekolah tatap muka dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu akan ditahan sampai mereka memiliki kartu vaksin sebagai tanda telah melakukan Vaksinasi COVID-19.

Untuk mengetahui kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan keempat kenapa yakin untuk melakukan Vaksinasi COVID-19? Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan mengatakan pada tanggal 27 Agustus 2022 sebagai berikut:

“Dulu disuruh untuk vaksin jadi ngikut saja dan waktu itu untuk mengurus segala keperluan administrasi butuh kartu vaksin”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten

⁵⁹

Wawancara dengan Siti Amanda, masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 27 Agustus 2022

Aceh selatan tergerak ingin melakukan Vaksinasi COVID-19 karena tidak ingin urusan administrasi mereka terhambat hanya karena tidak memiliki kartu vaksin COVID-19 bukan karena kesadaran mereka tentang bahaya COVID-19.

Pertanyaan sejalan juga peneliti tanyakan dengan masyarakat kabupaten Aceh selatan terkait pertanyaan kelima, apakah informan percaya dengan berita negatif tentang Vaksinasi COVID-19 dan apakah yakin kalau kandungan dalam Vaksin Covid-19 itu halal dan aman?

“Saat awal-awal munculnya COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, banyak sekali berita-berita negatif yang saya temui di internet maupun dari mulut ke mulut masyarakat sekitar. Tapi sejauh ini saya tidak terlalu percaya dengan berita negatif tersebut. Seperti virus dan vaksin ini merupakan rekayasa dari pemerintah dan pengusaha untuk memusnahkan sebagian populasi manusia, kandungan dalam vaksin itu haram dan membahayakan. Sejauh ini saya percaya bahwa vaksin COVID-19 itu bagus, pemerintah menganjurkan itu pasti karena ada dampak baiknya”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak berita-berita negatif tentang Vaksinasi COVID-19 ini yang beredar di internet dimana internet merupakan tempat memperoleh informasi yang paling mudah untuk diakses dan di tengah masyarakat juga banyak terdapat informasi negatif tentang Vaksinasi COVID-19 yang disebar dari mulut ke mulut.

⁶⁰

Wawancara dengan Siti Amanda, masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 27 Agustus 2022

Sehingga ketika peneliti turun langsung ke lapangan dan mewawancarai masyarakat, banyak masyarakat yang sebenarnya mengaku takut dengan Vaksinasi COVID-19 yang mereka anggap berbahaya bagi tubuh manusia berdasarkan berita yang tidak bersumber tersebut. Namun, banyak juga peneliti temukan bahwa masyarakat sudah mulai terbuka dan percaya kepada Pemerintahnya bahwa kebijakan Vaksinasi COVID-19 ini diciptakan untuk kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat membentengi diri mereka dari wabah COVID-19 melalui Vaksinasi COVID-19.

Selanjutnya, peneliti wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan keenam, informasi apa saja yang pernah diperoleh tentang Vaksinasi COVID-19?

“Kalau mengenai Vaksinasi COVID-19 ini, jujur banyak sekali kabar-kabar yang saya dengar dan baca di internet sehingga saya juga tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dulu saya sempat baca di internet bahwa Vaksinasi COVID-19 ini banyak efek sampingnya yang bisa merusak tubuh manusia, Vaksin ini juga merupakan rekayasa pemerintah dan lain sebagainya tapi berita-berita edukasi tentang bahaya COVID-19 dan pentingnya Vaksinasi Covid-19 juga banyak saya temui di internet maupun dari orang-orang sekitar saya”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi di internet dan orang-orang yang kontra

⁶¹

Wawancara dengan Zahara, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 25 Agustus 2022

dengan Vaksinasi COVID-19 membuat masyarakat kebingungan informasi mana yang harus dipercaya sebagai pegangan mereka.

4.2.2 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan

Ketika kepercayaan publik terhadap Vaksinasi COVID-19 rendah, maka itu menjadi PR besar bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 agar tujuan pemerintah yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini dapat menurun. Berikut beberapa strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kepercayaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.⁶²

Sosialisasi mempunyai peran besar dalam membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Vaksinasi COVID-19 karena masyarakat dapat diberikan pengetahuan dan informasi secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab.

⁶²

Dian Herdina, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 1 Nomor 3; November 2018.

Mengenai strategi pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan keenam, dengan banyaknya berita hoax yang beredar di tengah masyarakat sehingga membuat masyarakat takut dan enggan divaksin, apa yang Dinas Kesehatan lakukan?

“Kami melakukan sosialisasi dan edukasi ke kecamatan. Kemudian kami adakan tanya jawab dulu, berita hoax apa yang masyarakat baca kemudian kami akan menjawabnya sesuai dengan fakta. Kemudian di setiap kecamatan kami buat spanduk yang menghimbau masyarakat untuk vaksin”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam memerangi berita hoax dan asumsi-asumsi negatif masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 ini, Dinas Kesehatan mengambil langkah yang lebih ekstra. Yaitu melakukan sosialisasi ke kecamatan guna untuk menjangkau seluruh masyarakat.

Kemudian mereka melakukan tanya jawab secara langsung mengenai berita negatif apa yang mereka peroleh tentang Vaksin COVID-

63

Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

19, maka setelah itu dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan akan menjawab kecemasan dan ketakutan masyarakat tersebut sesuai fakta dan keilmuan. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan juga memasang spanduk di setiap daerah supaya masyarakat tahu pentingnya Vaksinasi COVID-19 ini untuk kepentingan diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka.



Gambar 4.4. Spanduk Himbauan Vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kluet Selatan

2. Memperkuat Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Terkait

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bab VI Pasal 33 ayat (5) Tentang Kerjasama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Yang berbunyi “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. Dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
- b. Tempat Vaksinasi COVID-19;
- c. Logistik/transportasi;
- d. Gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk *buffer persediaan/ stock piling*;
- e. Keamanan; dan/ atau
- f. Sosialisasi dan penggerakan masyarakat.⁶⁴

Dalam upaya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pemerintah memperkuat hubungan dengan seluruh lembaga yang terkait agar pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat mencapai target.

Sebagaimana yang peneliti wawancarai dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022 terkait peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan dengan pertanyaan ketujuh yang peneliti tanyakan yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan selama pelaksanaan Vaksinasi COVID-19? Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan sebagai berikut:

64

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

*“Kalau kendala yang kami hadapi, cukup besar. Di awal-awal ada penolakan besar-besaran dari masyarakat. karena masyarakat merasa bahwa Vaksin COVID-19 ini sebagai ancaman bagi mereka. Mereka tidak percaya sepenuhnya bahwa Vaksin COVID-19 dibuat untuk menangani virus ini. Sampai pada titik MPU, TNI dan POLRI harus terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi. Disaat itulah kami melakukan usaha pencapaian cakupan. Alhamdulillah ketika MPU, TNI dan POLRI sudah terlibat, cakupan vaksinasi kita jadi meningkat”.*⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa pada saat Vaksin Covid-19 mulai diharuskan di Kabupaten Aceh Selatan, tidak langsung bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Karena masyarakat menganggap bahwa Vaksin ini membahayakan bagi mereka.

3. Memberikan Reward Kepada Masyarakat Yang Telah divaksin

Strategi yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar mau mengikuti Vaksinasi COVID-19 adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan *reward* atau hadiah bagi masyarakat yang sudah di Vaksin. Seperti hadiah kepada anak sekolah dan pemberian sembako bagi masyarakat. Dengan dilakukannya strategi ini membuat masyarakat lebih mau untuk membuka diri terhadap Vaksinasi COVID-19.

65

Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

4.2.3 Data Rekapitulasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Aceh

Selatan Per Kecamatan

Tabel 4.3.
Penerimaan Vaksin Dosis 1

| No | Kecamatan | Puskesmas | Target | Realisasi | Persentase |
|----|--------------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Bakongan | Bakongan | 3415 | 3461 | 101,35% |
| 2 | Bakongan Timur | Seubadeh | 3354 | 2666 | 79,49% |
| 3 | Kluet Utara | -Kluet Utara | 11444 | 7355 | 64,27% |
| | | -Kuala Ba'u | 5320 | 4506 | 84,70% |
| | | -Kampong Paya | 2651 | 2555 | 96,38% |
| 4 | Kluet Selatan | Kluet Selatan | 13013 | 6752 | 51,89% |
| 5 | Kluet Tengah | Menggamat | 6260 | 2746 | 43,87% |
| 6 | Kluet Timur | -Kluet Timur | 3784 | 21912 | 76,96% |
| | | -Durian Kawan | 3088 | 2465 | 79,83% |
| 7 | Kota Bahagia | Buket Gadeng | 4290 | 4330 | 100,93% |
| 8 | Labuhan Haji | Labuhan Haji | 8804 | 8773 | 99,65% |
| 9 | Labuhan Haji Timur | Peulumat | 8128 | 3693 | 45,44% |
| 10 | Labuhan Haji Barat | Blang Keujeren | 13221 | 11458 | 86,67% |
| 11 | Meukek | -Meukek | 9001 | 6998 | 77,75% |
| | | -Drien Jalo | 5176 | 4274 | 82,57% |
| 12 | Pasio Raja | -Ladang Tuha | 6933 | 4605 | 66,42% |
| | | -Ujong Padang Rasian | 5912 | 5365 | 90,75% |
| | | -Tonkes Yonif 115 | 1248 | 445 | 35,66% |

| | | | | | |
|----|---------------|---|---|--|---|
| 13 | Samadua | Samadua | 14952 | 5516 | 36,89% |
| 14 | Sawang | Sawang | 15176 | 5571 | 36,71% |
| 15 | Tapak Tuan | -Tapak tuan -Lhok Bengkuang -BLUD RSUDYA -Klinik Cahaya Sehat -Urkes Polres Aceh Selatan -Poskes IM 10.05 | 12005 10594 11796 3020 3975 2506 | 2935 3556 3330 530 56306 2785 | 24,45% 33,57% 28,23% 17,55% 1416,5% 111,1% |
| 16 | Trumon | Trumon | 5712 | 3175 | 55,58% |
| 17 | Trumon Tengah | Ladang Rimba | 4672 | 2940 | 62,93% |
| 18 | Trumon Timur | Krueng Luas | 7333 | 6135 | 83,66% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2022

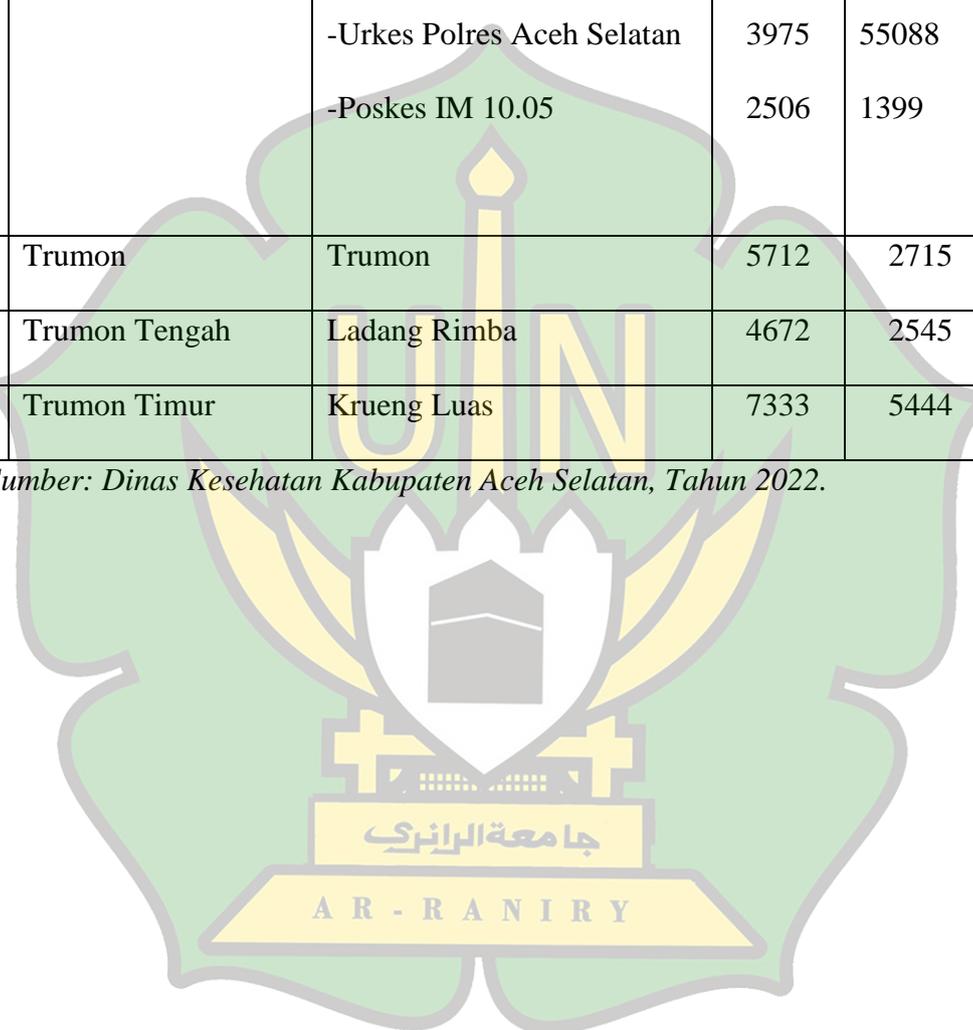


Tabel 4.4.
Penerimaan Vaksin Dosis 2

| No | Kecamatan | Puskesmas | Target | Realisasi | Persentase |
|----|--------------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Bakongan | Bakongan | 3415 | 3538 | 103,60% |
| 2 | Bakongan Timur | Seubadeh | 3354 | 2679 | 79,87% |
| 3 | Kluet Utara | -Kluet Utara | 11444 | 5212 | 45,54% |
| | | -Kuala Ba'u | 5320 | 3830 | 71,99% |
| | | -Kampung Paya | 2651 | 2032 | 76,65% |
| 4 | Kluet Selatan | Kluet Selatan | 13013 | 6656 | 51,15% |
| 5 | Kluet Tengah | Menggamat | 6260 | 1231 | 19,66% |
| 6 | Kluet Timur | -Kluet Timur | 3784 | 3751 | 99,13% |
| | | -Durian Kawan | 3088 | 2764 | 89,51% |
| 7 | Kota Bahagia | Buket Gadeng | 4290 | 2343 | 54,62% |
| 8 | Labuhan Haji | Labuhan Haji | 8804 | 6263 | 71,14% |
| 9 | Labuhan Haji Timur | Peulumat | 8128 | 3745 | 46,08% |
| 10 | Labuhan Haji Barat | Blang Keujeren | 13221 | 8998 | 68,06% |
| 11 | Meukek | -Meukek | 9001 | 4887 | 54,29% |
| | | -Drien Jalo | 5176 | 2729 | 52,72% |
| 12 | Pasie Raja | -Ladang Tuha | 6933 | 4546 | 65,57% |
| | | -Ujong Padang Rasian | 5912 | 3863 | 65,34% |
| | | -Tonkes Yonif 115 | 1248 | 431 | 34,53% |
| 13 | Samadua | Samadua | 14952 | 2695 | 18,02% |
| 14 | Sawang | Sawang | 15176 | 1966 | 12,95% |

| | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|-------|-------|----------|
| 15 | Tapak Tuan | -Tapak tuan | 12005 | 1984 | 16,53% |
| | | -Lhok Bengkuang | 10594 | 2172 | 20,50% |
| | | -BLUD RSUDYA | 11796 | 1816 | 15,40% |
| | | -Klinik Cahaya Sehat | 3020 | 538 | 17,81% |
| | | -Urkes Polres Aceh Selatan | 3975 | 55088 | 1385,86% |
| | | -Poskes IM 10.05 | 2506 | 1399 | 55,83% |
| 16 | Trumon | Trumon | 5712 | 2715 | 47,53% |
| 17 | Trumon Tengah | Ladang Rimba | 4672 | 2545 | 54,47% |
| 18 | Trumon Timur | Krueng Luas | 7333 | 5444 | 74,24% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2022.



Tabel 4.5.
Penerimaan Vaksin Dosis 3

| No | Kecamatan | Puskesmas | Target | Realisasi | Persentase |
|----|--------------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Bakongan | Bakongan | 3415 | 915 | 45,23 |
| 2 | Bakongan Timur | Seubadeh | 3354 | 701 | 36,53 |
| 3 | Kluet Utara | -Kluet Utara | 11444 | 2945 | 32,53 |
| | | -Kuala Ba'u | 5320 | 912 | 23,18 |
| | | -Kampung Paya | 2651 | 533 | 31,88 |
| 4 | Kluet Selatan | Kluet Selatan | 13013 | 2212 | 20,28 |
| 5 | Kluet Tengah | Menggamat | 6260 | 74 | 1,47 |
| 6 | Kluet Timur | -Kluet Timur | 3784 | 1353 | 48,03 |
| | | -Durian Kawan | 3088 | 1796 | 82,42 |
| 7 | Kota Bahagia | Buket Gadeng | 4290 | 360 | 12,30 |
| 8 | Labuhan Haji | Labuhan Haji | 8804 | 1691 | 26,50 |
| 9 | Labuhan Haji Timur | Peulumat | 8128 | 1035 | 15,97 |
| 10 | Labuhan Haji Barat | Blang Keujeren | 13221 | 2593 | 25,46 |
| 11 | Meukek | -Meukek | 9001 | 834 | 11,56 |
| | | -Drien Jalo | 5176 | 729 | 19,97 |
| 12 | Pasie Raja | -Ladang Tuha | 6933 | 1466 | 25,95 |
| | | -Ujong Padang Rasian | 5912 | 1538 | 33,63 |
| | | -Tonkes Yonif 115 | 1248 | 0 | 0,00 |
| 13 | Samadua | Samadua | 14952 | 140 | 1,13 |
| 14 | Sawang | Sawang | 15176 | 139 | 1,09 |

| | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| 15 | Tapak Tuan | -Tapak tuan | 12005 | 209 | 2,32 |
| | | -Lhok Bengkuang | 10594 | 159 | 2,00 |
| | | -BLUD RSUDYA | 11796 | 658 | 6,46 |
| | | -Klinik Cahaya Sehat | 3020 | 13 | 0,51 |
| | | -Urkes Polres Aceh Selatan | 3975 | 27537 | 805,88 |
| | | -Poskes IM 10.05 | 2506 | 503 | 23,94 |
| 16 | Trumon | Trumon | 5712 | 1417 | 34,61 |
| 17 | Trumon Tengah | Ladang Rimba | 4672 | 1215 | 38,23 |
| 18 | Trumon Timur | Krueng Luas | 7333 | 1698 | 28,29 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, 02 Agustus Tahun 2022.

Dari 236.487 jiwa jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Aceh Selatan⁶⁶, capaian masyarakat yang telah mendapatkan Vaksinasi COVID-19 sudah mencapai persentase tinggi. Yaitu sebagaimana yang peneliti wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan terkait pertanyaan ketujuh, dari jumlah masyarakat Kabupaten Aceh, berapa banyak masyarakat yang telah melakukan Vaksinasi COVID-19?

“Alhamdulillah persentase masyarakat yang telah menerima Vaksinasi COVID-19 sudah tinggi. Yaitu pada tahap satu sudah mencapai

⁶⁶

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.

kurang lebih 90,% tahap kedua 71, 50% dan tahap ketiga yang masih sedikit rendah yaitu kurang lebih 34,35%”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa jumlah capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan sudah tinggi. Di tahap satu persentasenya sudah tinggi. Tahap kedua juga sudah lumayan tinggi dan tahap ketiga yang masih belum bisa dikatakan berhasil.

Dari hasil wawancara ini peneliti menanyakan kembali sebab tahap kedua dan ketiga tidak dapat mencapai keberhasilan seperti pada tahap pertama. Apa yang menyebabkan tahap kedua dan ketiga ini jadi menurun?

“itu disebabkan karena masyarakat masih takut, termakan berita-berita negatif dan merasa bahwa jika sudah melakukan tahap satu Vaksinasi COVID-19 tidak harus melanjutkan sampai tahap terakhir”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah persentase Vaksinasi tahap dua dan tiga dari tahap pertama dikarenakan

⁶⁷ Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Sub koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022

masyarakat masih merasa takut dan termakan berita-berita negatif serta masyarakat merasa bahwa tidak perlu melanjutkannya sampai tahap akhir.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh, yaitu:

1. Tingginya data Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan tidak menjamin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
2. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 masih rendah walaupun data Vaksinasi yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan jumlah data masyarakat yang telah divaksin sudah tinggi.
3. Sebagian besar masyarakat terdorong melakukan Vaksinasi COVID-19 karena ingin terbebas dari sanksi administrasi dan tidak ingin bantuan sosial tertahan.
4. Ketika awal isu Vaksinasi COVID-19 ini hadir, masyarakat melakukan penolakan besar-besaran sehingga mengharuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan melakukan sosialisasi Vaksinasi COVID-19 bersama dengan MPU, TNI dan POLRI. Dengan demikian capaian Vaksinasi COVID-19 semakin meningkat.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan melakukan strategi meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan dengan beberapa strategi. Yaitu melakukan sosialisasi, memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan memberikan *reward* kepada masyarakat yang sudah melakukan Vaksinasi COVID-19.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

1. Komunikasi. Menjelaskan secara detail dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai vaksin.
2. Edukasi. Masyarakat butuh diberi edukasi mengenai Vaksinasi COVID-19 sehingga membuat masyarakat lebih dapat berpikir secara terbuka.
3. Informasi. Informasi yang sesuai fakta harus intens dijelaskan kepada masyarakat sehingga jika informasi yang didapat sudah jelas dan transparan, kepercayaan masyarakat akan terbangun dan mereka mau untuk divaksin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Mappiare AT. 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama
- Ariesto Hadi Sutopo. 2012. *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Darmiyati Zuchdi. 2003. *Empati dan Keterampilan Sosial*. Cakrawala Pendidikan: Jakarta
- Iwan fasadi. 2019. Proposal. *Kualitas Personil Dalam Rangka Pelayanan Kepolisian Negara pada Polisi Sektor (POLSEK) Simpang Tiga Polres Aceh Besar*, Universitas Iskandar Muda. Banda Aceh.
- Misbahul Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi 2*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-32*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moordiningsih, Faturochman & Kim, U. 2010. *Trust to Politician: Indigenous Psychological Analysis*, Laporan penelitian: Universitas Gadjah Mada.
- Nurudin. 2002. *Komunikasi Propaganda*, cet. II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nursanti Jamaluddin. 2021. *Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Penggunaan Sistem Kearsipan Berbasis Elektronik Di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Prof. Deddy Mulyana, MA, Ph.D. 2012. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Saskia R Talib,dkk. 2021. “*Kajian Peran Humas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Vaksin Sinovac*”. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sayed Amirulkamar. 2017. *Kebijakan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, edisi ke-1*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh(NASA).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sri Suitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

Wirman Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga

Jurnal:

Arimurti Kriswibowo, *Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan vaksinasi COVID-19 Di Kota Surabaya*, 2019. Vol. 4 No.2

Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah, *Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19*, Procideengs UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: I No: 32. November 2021, hal. 58

Dian Herdina, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 1 Nomor 3; November 2018

Essi Hermaliza, *Sistem Keekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh selatan*, Vol. 14 No.1, 2011.

Martin Venno H dan Dr. Hartono Subagio, *Analisis Pengaruh Kepercayaan terhadap tenaga penjual (trust in employee), dan kepercayaan terhadap merek (trust in brand) terhadap niat beli (purchase intention) konsumen pada Berninin furniture di Surabaya dan Semarang*, 2013. Vol. 1, No. 2

Nining Puji Astuti, dkk. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19”. Jurnal Keperawatan Volume 13 No. 3, September 2021.

Rasdiana, Riski Ramadhani. *Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*, Vol. XVII, 2021, 249-264, Jurnal Administrasi Publik, 2021.

Susi artuti. “Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid-19”. Jurnal Komunikasi Volume 10 No. 1, Juni 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)

RKPK Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019

KBBI

Artikel/Website

Alfath Asmunda, *Lima Hari 2.493 Warga Banda Aceh Divaksinasi Covid-19*, merdeka.com, 2021.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan

<https://www.kemkes.go.id/>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/>

<http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/>

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

INSTRUMEN PENELITIAN

KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEL

AKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Informan 1 Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan

Tanggal wawancara: 23 Agustus 2022

Identitas Informan 1:

Nama : Lia Afrisa Janan

Umur : 38 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi

Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja peran Dinas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19?
2. Tantangan apa yang dihadapi selama pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan bagaimana cara menghadapinya?
3. Apakah Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengalami efek samping dari vaksinasi covid-19?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan vaksinasi ini?
5. Bagaimana bapak/ibu melihat keadaan masyarakat yang merasa resah dan ketakutan untuk melakukan Vaksinasi COVID-19

6. Ketika awal vaksin covid-19 ini hadir, menimbulkan banyak asumsi-asumsi negatif dari masyarakat dan banyak berita hoax, apa yang Dinas Kesehatan lakukan?

Informan Masyarakat yang Divaksin

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah informan pernah terinfeksi COVID-19?
2. Kenapa informan yakin untuk mengikuti vaksinasi COVID-19?
3. Apakah informan yakin kalau kandungan dalam vaksin COVID-19 itu halal?
4. Informasi apa saja yang pernah informan peroleh tentang vaksinasi COVID-19?
5. Menurut informan sendiri, apakah vaksinasi COVID-19 ini merupakan upaya yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19?

Informan Masyarakat yang Tidak Divaksin

Pertanyaan

1. Apakah informan pernah terinfeksi COVID-19?
2. Kenapa informan tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19?
3. Apakah informan yakin kalau kandungan dalam vaksin COVID-19 itu halal?
4. Informasi apa saja yang pernah informan peroleh tentang vaksinasi COVID-19?

5. Menurut informan sendiri, apakah vaksinasi COVID-19 ini merupakan upaya yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19?



Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Lia Afrisa Janan Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022



Wawancara dengan Cut Ida masyarakat Desa Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan pada 15 September 2022



Wawancara dengan Nurma Astuti masyarakat Desa Krueng Luas Kabupaten Aceh Selatan pada 15 September 2022



Wawancara dengan Siti Amanda Mahasiswi Universitas Syiah Kuala pada tanggal 27 Agustus 2022



Wawancara dengan Nur aini Santri Dayah Darurrahmah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 31 Agustus 2022



Wawancara dengan Isma Santri Dayah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 2 September 2022

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama lengkap : Syawitri Rauziah
 Tempat/tanggal lahir : Koto, 22 November 1999
 Jenis kelamin : Perempuan
 Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Tinggi/Berat badan : 159 cm/ 59 kg
 Alamat : Kota Fajar
 Telpon/WA : 082294798168
 Email : 180802058@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

2005-2007 : TK Darma Wanita Kota Fajar
 2007-2012 : SDN 1 Kota Fajar
 2012-2015 : SMPN 1 Kota Fajar
 2015-2018 : SMAS Insan Madani Meukek

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Mawardi
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Kota Fajar
 Nama Ibu : Karmina
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Kota Fajar